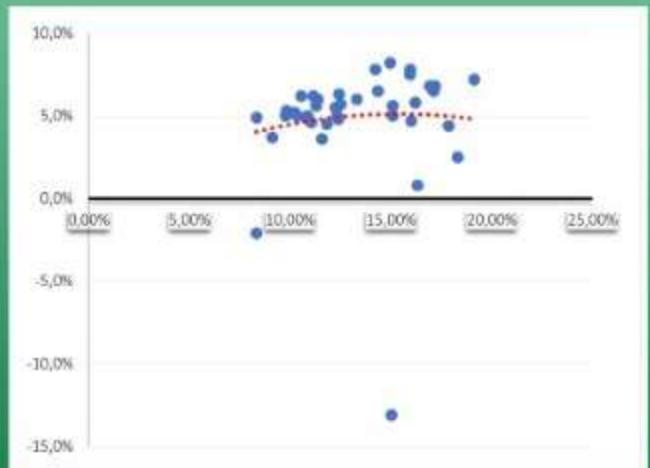
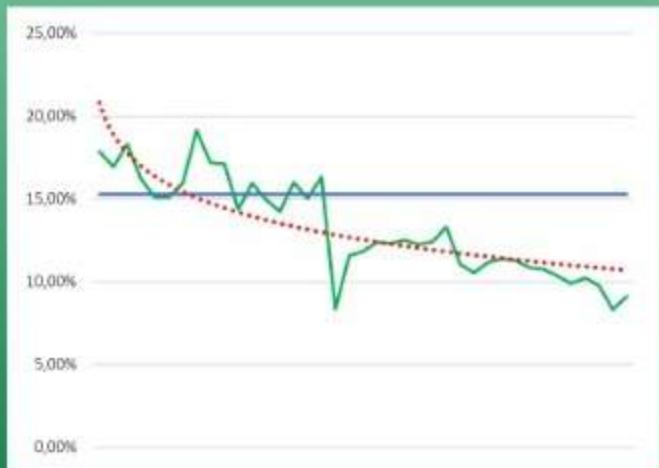


Pertumbuhan EKONOMI dan PERPAJAKAN



Yossinomita,
Haryadi, Saidin Nainggolan,
Zulfanetti

Pertumbuhan EKONOMI dan PERPAJAKAN

**Yossinomita,
Haryadi, Saidin Nainggolan,
Zulfanetti**



Haura Utama

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Rabb Semesta Alam atas limpahan berkah dan rahmatNya sehingga buku yang berjudul "Pertumbuhan Ekonomi dan Perpajakan" ini bisa diselesaikan. Tujuan utama penulisan buku ini adalah untuk menganalisis hubungan dua variabel ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi dan perpajakan. Buku ini menyelidiki hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan perpajakan di Indonesia, menggali dampak perpajakan terhadap perkembangan ekonomi negara. Dengan analisis mendalam, penulis membahas peran perpajakan dalam membentuk kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang optimal. Selain itu, buku ini juga mengeksplorasi strategi perpajakan yang dapat diterapkan untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi. Dengan pendekatan interdisipliner, buku ini menjadi panduan penting bagi para pembaca yang tertarik memahami dinamika kompleks antara pertumbuhan ekonomi dan sistem perpajakan di Indonesia.

Rasa terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Ketua Yayasan Universitas Dinamika Bangsa, Rektor Universitas Dinamika Bangsa, Dekan Fakultas

Pertumbuhan Ekonomi dan Perpajakan
karya Yossinomita, Haryadi, Saidin Nainggolan, dan Zulfanetti,
diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Haura Utama, 2024

15.5 x 23 cm, vi + 149 hlm

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang mereproduksi atau memperbanyak seluruh
maupun sebagian dari buku ini dalam bentuk dan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

Editor dan Penata isi: Zulfa
Perancang sampul: Nita

 **CV. Haura Utama**
• Anggota IKAPI Nomor 375/JBA/2020
• Nagrak, Benteng, Warudoyong, Sukabumi
• +62877-8193-0045 haurautama@gmail.com

Cetakan I, Januari 2024

ISBN: 978-623-492-780-1

 penerbithaura.com

Ilmu Manajemen dan Bisnis Universitas Dinamika Bangsa, Ketua Program Studi Ilmu Manajemen Universitas Dinamika Bangsa; dan Rektor Universitas Jambi, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Direktur Pascasarjana Universitas Jambi, Ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Jambi, serta pihak-pihak lain yang berperan di dalam proses pendanaan dan penerbitan buku ini.

Jambi, Januari 2024

Yossinomita

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
KONTRIBUSI PAJAK DALAM PEREKONOMIAN	1
PENDAPATAN NASIONAL	7
A. Konsep pendapatan nasional.....	8
B. Metode perhitungan pendapatan nasional	11
C. Trend pendapatan nasional.....	15
KEUANGAN NEGARA DAN PENDAPATAN BEGARA.....	19
PENERIMAAN PERPAJAKAN	24
A. Defenisi pajak.....	24
B. Fungsi Pajak	27
C. Asas-asas pemungutan pajak.....	29
D. Teori-teori pemberian pemungutan pajak.....	31
E. Tarif pajak.....	33
F. Pajak sebagai sumber utama pendapatan negara.....	34
G. Trend penerimaan pajak	37
REFORMASI PERPAJAKAN	41
HUBUNGAN PENERIMAAN PAJAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	48
A. Pajak berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi	49
B. Pajak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi	54

C. Teori pertumbuhan endogen dalam hubungan penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi.....	58
D. Analisis hubungan penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi.....	62
RASIO PAJAK YANG MEMAKSIMALKAN PERTUMBUHAN EKONOMI	82
A. Teori kurva Laffer.....	82
B. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB yang menciptakan pertumbuhan ekonomi optimal.....	87
C. Trend rasio pajak (<i>tax ratio</i>).....	94
D. Analisis rasio pajak yang memaksimalkan pertumbuhan ekonomi.....	96
STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	118
PROSPEK DAN REKOMENDASI.....	123
A. Prospek pengembangan lebih lanjut.....	123
B. Rekomendasi untuk pemangku kepentingan dan penelitian masa depan	126
DAFTAR PUSTAKA.....	128
RIWAYAT HIDUP	145

KONTRIBUSI PAJAK DALAM PEREKONOMIAN

Indonesia saat ini sedang dalam tahap pembangunan di berbagai jenis infrastruktur, karenanya pemerintah Indonesia sedang gencar-gencarnya mencari sumber pendapatan negara melalui berbagai cara, seperti hutang dan tentunya pajak. Pajak adalah merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting guna membangun atau memperbaiki infrastruktur, dan tentunya untuk meningkatkan perekonomian negara.

Penerimaan perpajakan adalah penerimaan utama dalam APBN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 8 huruf e, hal ini mengimplikasikan bahwa penerimaan perpajakan sebagai salah satu unsur dari pelaksanaan dalam pemungutan pendapatan negara harus mampu untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara.

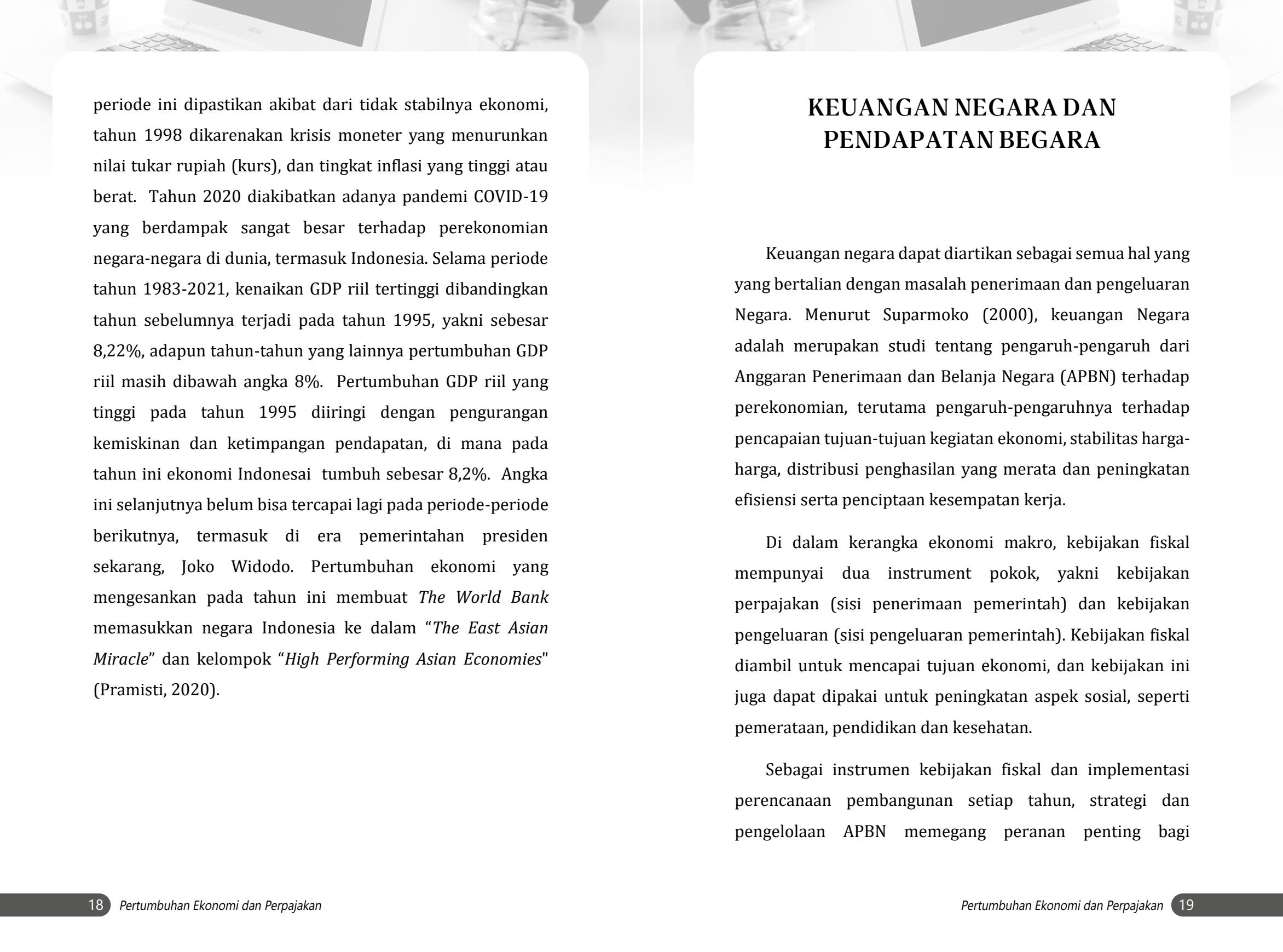
Pentingnya kenaikan pendapatan negara dari penerimaan perpajakan sejalan dengan meningkatnya kebutuhan belanja negara untuk pembangunan nasional. Penerimaan perpajakan adalah merupakan sarana untuk

pajak yang optimal adalah struktur pajak yang memprioritaskan dan memaksimalkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat.

PENDAPATAN NASIONAL

Pendapatan Nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor produksi yang digunakan untuk memproduksikan barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu. Definisi pendapatan nasional, menurut Mankiw (2015) : "Pendapatan nasional adalah total pendapatan yang diperoleh penduduk suatu negara dalam produksi barang dan jasa." Menurut Ragandhi (2012), pendapatan nasional menunjukkan kemampuan suatu negara dalam menghasilkan pendapatan/balas jasa kepada faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di negara tersebut.

Pendapatan nasional juga dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara. Salah satu tolak ukur yang dapat digunakan untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara adalah pendapatan nasional. Tujuan dari perhitungan pendapatan nasional ini adalah untuk mendapatkan Gambaran tentang tingkat ekonomi yang telah dicapai dan nilai output yang diproduksi, komposisi pembelanjaan agregat, sumbangan dari berbagai sektor perekonomian, serta tingkat kemakmuran yang dicapai. Selain itu, data pendapatan nasional yang telah dicapai dapat digunakan untuk membuat prediksi tentang perekonomian



periode ini dipastikan akibat dari tidak stabilnya ekonomi, tahun 1998 dikarenakan krisis moneter yang menurunkan nilai tukar rupiah (kurs), dan tingkat inflasi yang tinggi atau berat. Tahun 2020 diakibatkan adanya pandemi COVID-19 yang berdampak sangat besar terhadap perekonomian negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Selama periode tahun 1983-2021, kenaikan GDP riil tertinggi dibandingkan tahun sebelumnya terjadi pada tahun 1995, yakni sebesar 8,22%, adapun tahun-tahun yang lainnya pertumbuhan GDP riil masih dibawah angka 8%. Pertumbuhan GDP riil yang tinggi pada tahun 1995 diiringi dengan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, di mana pada tahun ini ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 8,2%. Angka ini selanjutnya belum bisa tercapai lagi pada periode-periode berikutnya, termasuk di era pemerintahan presiden sekarang, Joko Widodo. Pertumbuhan ekonomi yang mengesankan pada tahun ini membuat *The World Bank* memasukkan negara Indonesia ke dalam “*The East Asian Miracle*” dan kelompok “*High Performing Asian Economies*” (Pramisti, 2020).

KEUANGAN NEGARA DAN PENDAPATAN BEGARA

Keuangan negara dapat diartikan sebagai semua hal yang bertalian dengan masalah penerimaan dan pengeluaran Negara. Menurut Suparmoko (2000), keuangan Negara adalah merupakan studi tentang pengaruh-pengaruh dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) terhadap perekonomian, terutama pengaruh-pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan-tujuan kegiatan ekonomi, stabilitas harga-harga, distribusi penghasilan yang merata dan peningkatan efisiensi serta penciptaan kesempatan kerja.

Di dalam kerangka ekonomi makro, kebijakan fiskal mempunyai dua instrument pokok, yakni kebijakan perpajakan (sisi penerimaan pemerintah) dan kebijakan pengeluaran (sisi pengeluaran pemerintah). Kebijakan fiskal diambil untuk mencapai tujuan ekonomi, dan kebijakan ini juga dapat dipakai untuk peningkatan aspek sosial, seperti pemerataan, pendidikan dan kesehatan.

Sebagai instrumen kebijakan fiskal dan implementasi perencanaan pembangunan setiap tahun, strategi dan pengelolaan APBN memegang peranan penting bagi

PENERIMAAN PERPAJAKAN

A. Defenisi pajak

Dalam sistem ekonomi yang terdiri dari tiga atau empat sektor, terdapat satu sektor yang menyeimbangkan konsumen domestik, produsen, dan sektor eksternal, yaitu sektor publik. Melalui sektor publik, negara sebagai sektor keadilan ekonomi memiliki sarana untuk mengatur kegiatan ekonomi agar sektor lain memperoleh keuntungan dan kemakmuran dalam bentuk kebijakan fiskal. Dalam konteks ekonomi makro, kebijakan fiskal terdiri dari dua instrumen, yakni kebijakan perpajakan (*taxation*) dan kebijakan pengeluaran (*public spending*). Pajak adalah instrumen kebijakan fiskal yang berfungsi sebagai sumber penerimaan negara dan pengatur perekonomian (Schiller & Gebhardt, 2005; Yossinomita, 2022). Peran kebijakan perpajakan adalah untuk mencapai tujuan ekonomi dan meningkatkan aspek sosial seperti pemerataan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Pajak yang dikenakan pada berbagai sektor kehidupan ekonomi merupakan sumber utama penerimaan negara dan memegang peranan penting dalam pengelolaan APBN.

Ada beberapa pengertian pajak, baik pendapat dari dalam maupun dari luar negeri, yakni:

1. A. Rochmat Soemitro, pajak adalah transfer dari sektor swasta kepada penguasa atas dasar hukum dan undang-undang, dapat dipaksakan dengan tujuan untuk membiayai produksi nasional (Soemitro, 1990).
2. Djajaningrat, pajak adalah kewajiban mengalihkan sebagian harta ke negara disebabkan oleh kondisi, peristiwa dan tindakan yang memberi status, tetapi bukan hukuman, dapat dipaksakan dan tidak ada penggantian langsung, dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat (Djajadingrat, 2014).
3. Adam Smith, pajak sebagai "*donations by citizens to support the nation,*" bahwa pajak merupakan kontribusi warga negara untuk mendukung negara (Smith, 1904).
4. Ray M. Sommerfeld, Hershel M. Anderson dan Horace R. Brock, "*Taxes are non-criminal but mandatory remittances of funds from the private to the public sectors, collected based on criteria specified, with no mention of specific services, and the value of attaining some of the country's economic and social goals,*" pajak adalah suatu kewajiban, bukan suatu bentuk hukuman, mereka yang mentransfer dana dari sektor swasta ke sektor publik, dikumpulkan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan

perpajakan mengalami penurunan yang cukup signifikan (Satya & Dewi, 2010).

Sedangkan, penurunan penerimaan pajak pada tahun 2009 dan 2020, dipastikan akibat krisis ekonomi global dan pandemi COVID-19, yang berdampak terhadap perekonomian Indonesia, yang pada akhirnya mengakibatkan pertumbuhan penerimaan pajak yang negatif pada kedua tahun ini.

REFORMASI PERPAJAKAN

Reformasi perpajakan di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, ada dua fase dalam proses reformasi yang merupakan proses perubahan yang sangat krusial di dalam sistem perpajakan Indonesia. Menurut Fuad Bawazier, Menteri Keuangan Republik Indonesia pada masa kabinet pembangunan VII, reformasi perpajakan Indonesia fase pertama dimulai pada tahun 1983, yaitu pengenalan prinsip *self assessment* untuk perhitungan PPh (penghasilan) dan PPN (pajak pertambahan nilai) menggantikan pajak penjualan. Reformasi pajak yang signifikan terjadi lagi pada tahun 1994 dan 1997 melalui paket amandemen yang komprehensif atau undang-undang perpajakan yang baru, di mana reformasi pajak mencakup 4 sampai 5 undang-undang pajak (Bawazier, 2011).

Fase kedua terjadi setelah tahun 1997 atau pada masa reformasi, perubahan-perubahan terhadap peraturan perpajakan terus berlanjut, meskipun nuansanya seperti kehilangan arah atau tujuan yang jelas, atau dapat dikatakan “asal berubah.” Perubahan terakhir setelah tahun 1997 adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Pajak Penghasilan

HUBUNGAN PENERIMAAN PAJAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Para ekonom berpendapat bahwa selain akumulasi modal dan perkembangan teknologi, ada faktor lain yang memiliki peranan penting terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu negara, seperti: populasi, tenaga kerja, keterbukaan dalam perdagangan internasional, dan kebijakan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat pada periode 1968-1991 disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu: 1). Membaiknya hubungan perdagangan; 2). Pesatnya perkembangan teknologi khususnya di bidang pertanian; 3). Kebijakan pajak dalam negeri yang ekspansif dari pemerintah"(Sundrum, 1986).

Hubungan perpajakan dan PDB yang diprosikan dengan pertumbuhan ekonomi telah lama menjadi hal yang sangat menarik bagi para pembuat kebijakan, akademisi dan peneliti di bidang ekonomi dan perpajakan. Secara teoritis, ada dua pendapat yang saling bertentangan satu sama lain dalam menjelaskan hubungan antara penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi. Pendapat pertama adalah bahwa penerimaan pajak berpengaruh negatif terhadap

pertumbuhan ekonomi, sementara pendapat kedua bahwa penerimaan pajak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

A. Pajak berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi

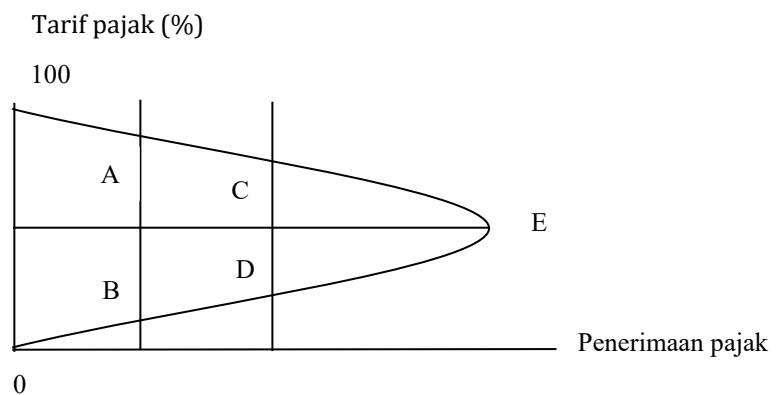
Dikemukakan pertama kali oleh Keynes (1936). Keynes menjelaskan hubungan negatif ini dari fungsi output, yakni bahwa pendapatan nasional (Y) yang dapat disamakan dengan pertumbuhan ekonomi akan menurun dengan semakin tingginya penerimaan pajak, karena Y (pendapatan nasional) yang merupakan fungsi dari konsumsi rumah tangga (C), pengeluaran pemerintah (G), investasi (I) dan ekspor neto (NE), di mana pajak (T) akan mengurangi konsumsi rumah tangga (C). Jadi semakin tinggi pajak, semakin rendah C , dan akhirnya Y juga akan berkurang. Pengaruh negatif didukung juga oleh ekonom-ekonom seperti Alesina & Perotti (1996), Blanchard & Perotti (1999), dan Easterly & Rebelo (1993), di mana hasil penelitian mereka menegaskan hubungan yang negatif antara perpajakan dan pertumbuhan ekonomi.

Teori Keynes atau yang dikenal dengan Keynesian adalah tanggapan Keynes terhadap depresiasi ekonomi yang melanda Amerika pada tahun 1930-an dan kritik terhadap teori klasik. Di mana teori klasik mengatakan bahwa

RASIO PAJAK YANG MEMAKSIMALKAN PERTUMBUHAN EKONOMI

A. Teori kurva Laffer

Kurva ini diperkenalkan oleh Arthur B. Laffer, seorang ahli ekonomi yang pada saat itu menjabat sebagai penasihat Ekonomi Presiden Amerika Serikat, Ronald Reagan, dalam sebuah acara jamuan makan malam bersama Jude Wanniski, Dick Cheney, dan Donald Rumsfeld. Dalam tulisannya Wanniski (1978) mengemukakan bahwa pada saat jamuan makan malam tersebut Laffer mempresentasikan, untuk mendukung pemotongan pajak. Laffer menggambarkan sebuah kurva hubungan antara tarif pajak dan penerimaan, dan mengatakan bahwa "Selalu ada dua tarif pajak yang menghasilkan pendapatan yang sama." Tarif pajak berada pada sumbu vertikal, sedangkan penerimaan berada pada sumbu horizontal. Pendapatan tergantung dari ukuran dasar kena pajak (yang tidak muncul dalam grafik) dan dari tingkat tarif pajak.



Sumber : Wanniski (1978)

Gambar 7.1. Kurva Laffer

Lengkungan kurva dari titik 0 sampai titik E adalah area normal (*normal range*), sementara lengkungan dari titik E sampai dengan titik 100 adalah area terlarang (*prohibitive range*). Area terlarang merupakan area dimana tarif pajak lebih besar dari titik E (titik optimal). Dari kurva Laffer terlihat bahwa pada titik ekstrim pertama 0% penerimaan pemerintah dari pajak nol karena tidak adanya pajak. Dan ketika di titik ekstrim kedua 100%, berapapun pendapatan masyarakat akan diserahkan semuanya kepada pemerintah sehingga artinya masyarakat tidak termotivasi untuk bekerja dan menaikkan pendapatan. Penerimaan pajak akan sama pada saat tarif pajak berada di titik A dan B, begitu juga ketika di titik C dan D. Tetapi, ada satu titik atau level tarif pajak yang akan memaksimalkan penerimaan, yakni titik E seperti yang tergambar pada kurva Laffer diatas.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Teori pertumbuhan endogen merupakan model ekonomi yang dapat menilai hubungan dan pengaruh perpajakan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi bersifat endogen, perpajakan memiliki hubungan dan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, serta dapat juga mempengaruhi faktor-faktor yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi (Myles, 2000). Inti dari pemikiran pertumbuhan endogen bukanlah sesuatu yang baru, namun adalah suatu keterbaruan karena adanya tuntutan keadaan. Penerimaan pajak menyebabkan atau mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan aktivitas kegiatan ekonomi, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan aktivitas ekonomi juga akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak, baik dari basis pajak maupun nominal penerimaan pajak.

Semakin maju perekonomian suatu negara maka peranan pajak juga semakin besar. Kebijakan terbaik yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan cara melakukan efisiensi dalam sistem perpajakan. Efisiensi sistem perpajakan menunjukkan besaran penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan oleh

pemerintah dengan menggunakan sumber daya yang dimilikinya. Sumber daya yang dimaksud adalah seperti kuantitas dan kualitas aparatur pajak (fiskus), institusi (lembaga) pajak, sistem pemungutan pajak, dan reformasi di bidang perpajakan. Artinya dengan menggunakan sumber daya yang ada dapat merealisasikan target penerimaan pajak yang tercantum dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Efisiensi sistem perpajakan juga harus mengacu kepada arti ekonomis dari perpajakan itu sendiri, bahwa *dampak negatif* dari pemungutan penerimaan pajak diminimalisir, sedangkan *dampak positif* dari penerimaan pajak dimaksimalkan. Efisiensi dari sistem pajak ditentukan dari administrasi pajak. Kebijakan dibidang perpajakan tidak akan meningkatkan kinerja dan penerimaan pajak jika tidak didukung oleh administrasi pajak yang baik dan benar. Reformasi pajak (*tax reform*) adalah salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemungutan pajak melalui penyederhanaan sistem pajak, sehingga wajib pajak tidak mengalami kendala dan kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya kepada negara. Namun, pada kenyataannya pelaksanaan dari reformasi pajak seringkali bersifat kompleks dan juga berat untuk dijalankan, karena berkaitan dengan kekuatan politik dan ekonomi.

- harus memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi;
- 5). Meningkatkan integritas dan moral pejabat dan pegawai kantor pajak, dengan cara menerapkan profesionalitas dan *good governance* di lingkungan internal Kementerian Keuangan yang merupakan organisasi dari pejabat dan pegawai pajak. Sehingga kegiatan dan transaksi pembayaran pajak menjadi sebuah kebutuhan bukan kewajiban yang dipaksakan. Hal ini hanya dapat terjadi jika ada rasa kepercayaan masyarakat dan wajib pajak terhadap institusi pajak;
- 6). Melakukan dan meningkatkan efektivitas sosialisasi, penyuluhan, edukasi, dan hubungan dengan masyarakat yang berkelanjutan tentang kesadaran dan pentingnya membayar pajak, sehingga memunculkan kepatuhan wajib pajak di lingkungan organisasi dan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui sosial media. Selain itu, pentingnya juga upaya dari pemerintah untuk menanamkan dan menumbuhkan rasa bangga membayar pajak kepada generasi penerus bangsa;
- 7). Perbaikan administrasi perpajakan dengan memanfaatkan inovasi dan kemajuan teknologi untuk menciptakan sistem perpajakan yang terintegrasi.

PROSPEK DAN REKOMENDASI

A. Prospek pengembangan lebih lanjut

Teori pertumbuhan endogen (*endogeneous growth model*) memberikan dasar teori hubungan antara penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi. Besar kecilnya efek penerimaan pajak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tergantung pada struktur model dan nilai parameter dalam model. Teori pertumbuhan endogen memberikan model yang dapat menilai hubungan dan pengaruh perpajakan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi bersifat endogen, perpajakan memiliki pengaruh dan dapat juga mempengaruhi faktor-faktor yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Hubungan kausalitas dua arah (*bidirectional causality*) antara penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi mengartikan bahwa disamping penerimaan pajak menyebabkan atau mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan aktivitas kegiatan ekonomi, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan aktivitas ekonomi juga akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak, baik dari basis pajak maupun nominal penerimaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agell, J., & Persson, M. (2000). On the analytics of the dynamic Laffer curve. In *CESifo Working Paper Series* (383; December). <https://doi.org/10.20955/r.85.67>
- Alesina, A., & Perotti, R. (1996). Fiscal adjustments in OECD countries: composition and macroeconomic effects. In *National Bureau of Economic Research Working Paper Series* (5730; August).
- Arvin, M. B., Pradhan, R. P., & Nair, M. S. (2021). Are there links between institutional quality, government expenditure, tax revenue and economic growth? Evidence from low-income and lower middle-income countries. *Economic Analysis and Policy*, 70, 468–489. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2021.03.011>
- Asimakopoulos, S., & Karavias, Y. (2016). The impact of government size on economic growth: a threshold analysis. *Economics Letters*, 139, 65–68. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2015.12.010>
- Aydin, C., & Esen, O. (2019). Optimal tax revenues and economic growth in transition economies: a threshold regression approach. *Global Business and Economics Review*, 21(2), 246–265. <https://doi.org/10.1504/gber.2019.098091>

- Barro, R. J. (1990). Government spending in a simple model of endogenous growth. *Journal of Political Economy*, 98(5), 103–125. <https://doi.org/10.1086/261726>
- Barro, R. J., & Martin, X. S. (2004). Economic growth. In *New York: McGraw Hill* (2nd ed.). Massachusetts Institute of Technology.
- Bawazier, F. (2011). Reformasi pajak di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 8(1), 1–12.
- Bing, X., García, J. S., Gao, Y., & Chen, X. (2020). Driving total factor productivity: capital and labor with tax allocation. *Technological Forecasting and Social Change*, 150(C), 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.119782>
- Blanchard, O., & Perotti, R. (1999). An empirical characterization of the dynamic effects of changes in government spending and taxes on output. In *National Bureau Of Economics Research Working Paper Series* (7269; July).
- Boediono. (2016). *Ekonomi moneter* (Edisi 3). BPFE.
- Budiman, A. (2004). *Dasar-dasar pajak*. Fajar.
- Burton, R., & Wirawan, B. I. (2004). *Hukum pajak*. Salemba Empat.
- Chao, J. C. P., & Grubel, H. (1998). Optimal levels of spending and taxation in Canada. In H. Grubel (Ed.), *How to Use the Fiscal Surplus* (January). Simon Fraser University.

- Christie, T. (2014). The effect of government spending on economic growth: testing the non-linear hypothesis. *Bulletin of Economic Research*, 66(2), 183–204. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8586.2012.00438.x>
- Cohen-Stuart, A. J. (1889). *Bijdrage tot de theorie der progressive inkomsteuerbelasting*. The Hague.
- Djajadiningrat. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Dritsaki, C. (2017). Toda-Yamamoto causality test between inflation and nominal interest rates: evidence from three countries of Europe. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(6), 120–129.
- Due, J. F. (1968). *Government finance: economics of the public Sector* (R. D. Irwin (ed.); p. xiv).
- Dumairy. (1996). *Perekonomian Indonesia*. Erlangga.
- Easterly, W., & Rebelo, S. (1993). Fiscal policy and economic growth. *Journal of Monetary Economics*, 32(3), 417–458. [https://doi.org/10.1016/0304-3932\(93\)90025-B](https://doi.org/10.1016/0304-3932(93)90025-B)
- Ehrhart, H., Minea, A., & Villieu, P. (2014). Debt, seigniorage, and the growth Laffer curve in developing countries. *Journal of Macroeconomics*, 07(004), 1–27. <https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2014.07.004>
- Forte, F. (2015). Laffer effect. In *Encyclopedia of Law and Economics* (pp. 1–5). <https://doi.org/10.1007/978-1-4614-7883-6>

- Fu, Z., & Le Riche, A. (2021). Progressive consumption tax and monetary policy in an endogenous growth model. *Journal of Economics/ Zeitschrift Fur Nationalokonomie*, 133(3), 271–293. <https://doi.org/10.1007/s00712-021-00732-0>
- Fullerton, D. (1980). Can tax revenues go up when tax rates go down? In *Office of Tax Analysis (OTA) Paper* (41; September). https://doi.org/10.1007/978-1-349-17563-5_9
- Gerritsen, A. (2023). Optimal nonlinear taxation: a simpler approach. *International Tax and Public Finance*, 30(4), 28–52. <https://doi.org/10.1007/s10797-023-09779-9>
- Gnangnon, S. K. (2023). Effects of the tax transition reform on the real exchange rate through the trade openness channel in developing countries. *Journal of Economic Integration*, 38(1), 115–146. <https://doi.org/10.11130/jei.2023.38.1.115>
- Gwartney, J. D., Stroup, R. L., Sobel, R. S., & Macpherson, D. A. (2013). *Economics: Private and Public Choice* (R. S. Sobel (ed.); 14th ed.). South-Western Cengage Learning.
- Haryadi, H., Umiyati, E., & Dhora, S. T. (2021). Competitiveness and export development strategy for Indonesia's creative economy sector in the ASEAN market. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan*

- Daerah, 9(2), 127–138.
<https://doi.org/10.22437/ppd.v9i2.11832>
- Ho, T. T., Tran, X. H., & Nguyen, Q. K. (2023). Tax revenue-economic growth relationship and the role of trade openness in developing countries. *Cogent Business and Management*, 10(2), 1–14.
<https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2213959>
- Howitt, P. (2009). Competition, innovation and growth. *Innovation and Growth*, 246, 15–24.
<https://doi.org/10.1787/9789264073975-4-en>
- Hsing, Y. (1996). Estimating the Laffer curve and policy implications. *The Journal of Socio-Economics*, 25(3), 395–401. [https://doi.org/10.1016/S1053-5357\(96\)90013-X](https://doi.org/10.1016/S1053-5357(96)90013-X)
- Ikhsan, M., Trialdi, L., & Syahrial, S. (2005). Indonesia's new tax reform: potential and direction. *Journal of Asian Economics*, 16(6), 1029–1046.
<https://doi.org/10.1016/j.asieco.2005.10.004>
- Jaimovich, N., & Rebelo, S. (2017). Nonlinear effects of taxation on growth. *Journal of Political Economy*, 125(1), 265–291. <https://doi.org/10.1086/689607>
- Karas, M. (2012). Tax rate to maximize the revenue: Laffer curve for the Czech Republic. *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, 60(4), 189–194.
<https://doi.org/10.11118/actaun201260040189>

- Kavese, K., & Phiri, A. (2020). Optimal tax rates in South Africa: new empirical insights to the existing debate. *International Journal of Sustainable Economy*, 12(1), 44–60. <https://doi.org/10.1504/IJSE.2020.107861>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara, Pub. L. No. 02/PMK.05/2007 (2007).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Anggaran, D. P. A. (2014). *Dasar-dasar praktek penyusunan APBN di Indonesia* (Purwiyanto & K. W. D. Nugraha (eds.); II).
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Kennedy, P. E. (2000). On measuring the growth-maximizing tax rate. *Pacific Economic Review*, 5(1), 89–91.
<https://doi.org/10.1111/1468-0106.00090>
- Keser, C., Masclet, D., & Montmarquette, C. (2020). Labor Supply, Taxation, and the Use of Tax Revenues: A Real-Effort Experiment in Canada, France, and Germany. In *Public Finance Review* (Vol. 48, Issue 6).
<https://doi.org/10.1177/1091142120960491>
- Keynes, J. M. (1936). The general theory of employment, interest, and money. In *International Relations and Security Network*. ISN-ETH Zurich.
<https://doi.org/10.2307/2278703>

Kim, S., & Park, S. (2020). The effectiveness of capital expenditure in an endogenous growth model: evidence from US states. *International Journal of Economics and Business Research*, 19(4), 391–417.
<https://doi.org/10.1504/IJEBR.2020.107493>

Kohn, M. (1997). *Macro economics*. South-Western College Publishing.

Langen, W. J. de. (1954). *De grondbeginselen van het Nederlandse belastingrecht*. Samsom.

Le, T. M., Dodson, B. M., & Bayraktar, N. (2012). Tax capacity and tax effort: extended cross-country analysis from 1994 to 2009. In *Policy Research Working Papers* (6252; October).

Liapis, K. J., Politis, E. D., Ntertsou, D., & Thalassinos, E. I. (2020). Investigating the relationship between tax revenues and tax ratios: an empirical research for selected OECD countries. *International Journal of Economics and Business Administration*, 8(1), 215–229.
<https://doi.org/10.35808/ijeba/420>

Liapis, K., Rovolis, A., & Galanos, C. (2014). The tax regimes of the EU countries: Trends, similarities and differences. *Contributions to Economics*. Springer International Publishing Switzerland, 119–145.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-00494-5_7

Lin, B., & Jia, Z. (2019). Tax rate, government revenue and economic performance: A perspective of Laffer curve. *China Economic Review*, 56(January), 1–20.
<https://doi.org/10.1016/j.chieco.2019.101307>

Lin, S. A. Y. (1994). Government spending and economic growth. *Applied Economics*, 26(1), 83–94.
<https://doi.org/10.1080/00036849400000064>

Maesaroh. (2023). *Rasio pajak RI bisa anjlok, kalah dari Malaysia & Vanuatu!* CNBC Indonesia Research.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230127125143-4-408764/rasio-pajak-ri-bisa-anjlok-kalah-dari-malaysia-vanuatu/1>

Maganya, M. H. (2020). Tax revenue and economic growth in developing country: an autoregressive distribution lags approach. *Central European Economic Journal*, 7(54), 205–217. <https://doi.org/10.2478/ceej-2020-0018>

Mangkosoebroto, G. (2001). *Ekonomi publik* (Ketiga). BPFE UGM.

Mankiw, N. G. (2015). *Macroeconomics* (9th ed.). Worth Publishers.

Mardiasmo. (2009). *Perpajakan* (Revisi). CV. Andi Offset.

Maulida, R. (2018). *Fiskal: pengertian, tujuan, instrumen, dan macam-macam kebijakan fiskal*. Online-Pajak.Com.
<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/fiskal>

Milasi, S., & Waldmann, R. J. (2018). Top marginal taxation and economic growth. *Applied Economics*, 50(19), 2156–2170.

<https://doi.org/10.1080/00036846.2017.1392001>

Miyashita, D. (2023). Public debt and income inequality in an endogenous growth model with elastic labor supply. *International Journal of Economic Policy Studies*, 17(2), 30–55. <https://doi.org/10.1007/s42495-023-00106-y>

Mtui, J. M., & Ndanshau, M. O. A. (2020). Fiscal expansion, adjustment and economic growth in Tanzania : 1967–2016. *Business Management Review*, 23(2), 106–125. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3637258>

Muharman, B., & Maski, G. (2013). Analisis dinamis pengaruh instrumen fiskal terhadap PDB dan inflasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 1(2), 1–16.

Munawir, H. S. (2000). *Perpajakan*. Liberty.

Myles, G. D. (2000). Taxation and economic growth. *Fiscal Studies*, 21(1), 141–168. <https://doi.org/10.1111/j.1475-5890.2000.tb00583.x>

Nutahara, K. (2015). Laffer curves in Japan. *Journal of the Japanese and International Economies*, 36, 56–72. <https://doi.org/10.1016/j.jjie.2015.02.002>

Pata, U. K., Kartal, M. T., Erdogan, S., & Sarkodie, S. A. (2023). The role of renewable and nuclear energy R&D

expenditures and income on environmental quality in Germany: Scrutinizing the EKC and LCC hypotheses with smooth structural changes. *Applied Energy*, 342(April), 121138.

<https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2023.121138>

Peacock, A. T., & Wiseman, J. (1961). The growth of public expenditure in the United Kingdom. In *National Bureau Of Economics Research* (72; General). Princeton University Press.

Pramisti, N. Q. (2020). *Ekonomi Indonesia 1989-1996: berjaya tapi labil dan penuh KKN*. Tirto.Id. <https://tirto.id/ekonomi-indonesia-1989-1996-berjaya-tapi-labil-dan-penuh-kkn-f6zW>

Prasetyo, K. A. (2017). Tax administration reform in Indonesia: some lesson learned. *Journal of the Australasian Tax Teachers Association*, 12(1), 77–109.

Pratiwi, R. Y. (2023). *Tujuan reformasi UU HPP PPN dan NPWP*. Pajak.Com. <https://www.pajak.com/pajak/tujuan-reformasi-uu-hpp-ppn-dan-npwp/>

Prettner, K., & Rostam-Afschar, D. (2020). Can taxes raise output and reduce inequality? The case of lobbying. *Scottish Journal of Political Economy*, 67(5), 455–461. <https://doi.org/10.1111/sjpe.12248>

- Putra, E. (2014). A Study of the Indonesian's income tax reforms and the development of income tax revenues. *Journal of East Asian Studies*, 3(12), 55–68.
- Ragandhi, A. (2012). *Pengaruh Pendapatan Nasional, Inflasi, dan Suku Bunga Deposito Terhadap Konsumsi Masyarakat di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Rahardja, P., & Manurung, M. (2008). *Teori ekonomi makro suatu pengantar*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ray, S. (2022). Unraveling labour productivity growth and economic growth nexus in India: a Toda-Yamamoto dynamic Granger causality approach. *American Journal of Theoretical and Applied Business*, 8(4), 62–71. <https://doi.org/10.11648/j.ajtab.20220804.11>
- Renström, T. I., & Spataro, L. (2021). Optimal taxation in an endogenous growth model with variable population and public expenditure. *Journal of Public Economic Theory*, 23(4), 639–659. <https://doi.org/10.1111/jpet.12515>
- Romer, P. M. (1990). Human capital and growth: theory and evidence. *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy*, 32, 251–286. [https://doi.org/10.1016/0167-2231\(90\)90029-K](https://doi.org/10.1016/0167-2231(90)90029-K)
- Sabir, S. (2019). Fiscal policy, institutions and inclusive growth: evidence from the developing Asian countries.

- International Journal of Social Economics*, 46(6), 822–837. <https://doi.org/10.1108/IJSE-08-2018-0419>
- Sankaran, A., Kumar, S., K, A., & Das, M. (2019). Estimating the causal relationship between electricity consumption and industrial output: ARDL bounds and Toda-Yamamoto approaches for ten late industrialized countries. *Heliyon*, 5(6), e01904. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e01904>
- Satya, V. E., & Dewi, G. P. (2010). Perubahan undang-undang pajak penghasilan dan perannya dalam memperkuat fungsi budgetair perpajakan. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 1(1), 75–100.
- Schiller, B. R., & Gebhardt, K. (2005). *Essentials of economics* (11th ed). The McGraw-Hill Series Economics.
- Scully, G. W. (1995). The “growth tax” in the United States*. *Public Choice*, 85, 71–80. <https://doi.org/10.1007/BF01047902>
- Scully, G. W. (1996). Taxation and economic growth in New Zealand. *Pacific Economic Review*, 1(2), 169–177. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0106.1996.tb00182.x>
- Scully, G. W. (2000). The growth-maximizing tax rate. *Pacific Economic Review*, 5(1), 93–96. <https://doi.org/10.1111/1468-0106.00091>

- Scully, G. W. (2003). Optimal taxation, economic growth and income inequality. *Public Choice*, 115(3), 299–312.
<https://doi.org/10.1023/a:1024223916710>
- Setiawan, H. (2018). Analisis dampak kebijakan fiskal dan moneter terhadap kinerja makroekonomi di Indonesia dengan model structural vector autoregression (SVAR). *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 3(2), 23–43.
<https://doi.org/10.20473/jiet.v3i2.9169>
- Setiyaji, G., & Amir, H. (2005). Evaluasi kinerja sistem perpajakan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Universitas Indonusa Esa Unggul Jakarta*, November, 1–13.
- Smith, A. (1904). *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations* (5th ed.). Maryville University.
- Soemitro, R. (1990). *Azas dan dasar perpajakan*. Eresco.
- Soewardi, T. J., Ananda, C. F., & Erlando, A. (2018). Analisis hubungan kebijakan fiskal dan makroekonomi daerah kabupaten/kota di Jawa Timur. *Jurnal Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan*, 1(1), 1128–1148.
- Sommerfeld, R. M. et al. (1981). *An introduction to taxation*. New York: Harcourt Brace Jovanovich Inc.
- Srinivasan, T. N. (1995). Long-run growth theories and empirics: anything new? In T. Ito & A. O. Krueger (Eds.), *Growth Theories in Light of the East Asian Experience*,

- NBER-EAS* (Vol. 4, Issue January). University of Chicago Press.
- Steinmüller, E., Thunecke, G. U., & Wamser, G. (2019). Corporate income taxes around the world: a survey on forward-looking tax measures and two applications. *International Tax and Public Finance*, 26(2), 418–456.
<https://doi.org/10.1007/s10797-018-9511-6>
- Suandy, E. (2011). *Hukum pajak* (Edisi 5). Salemba Empat.
- Sukirno, S. (2015). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Raja Grafindo.
- Sundrum, R. M. (1986). Indonesia's rapid economic growth: 1968–81. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 22(3), 40–69.
<https://doi.org/10.1080/00074918612331334884>
- Suparmoko. (2000). *Keuangan negara dalam teori dan praktek* (Edisi 5). BPFE.
- Supramono, & Damayanti, T. W. (2005). *Perpajakan Indonesia: mekanisme dan perhitungannya*. Andi.
- Surjaningsih, N., Utari, G. A. D., & Trisnanto, B. (2012). Dampak kebijakan fiskal terhadap output dan inflasi. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 14(4), 389–419.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21098/bemp.v14i4.365>

Tambunan, M. R. U. D. (2020). Review reformasi sistem perpajakan di Norwegia: suatu pembelajaran bagi reformasi perpajakan Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Journal)*, 4(1), 1–13. <https://doi.org/10.31092/jpi.v4i1.648>

Tavor, T., Gonen, L. D., & Spiegel, U. (2019). Reservations on the classical Laffer curve. *The Review of Austrian Economics*, 34(4), 479–493. <https://doi.org/10.1007/s11138-019-00483-8>

Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. *Journal of Econometrics*, 66(1–2), 225–250. [https://doi.org/10.1016/0304-4076\(94\)01616-8](https://doi.org/10.1016/0304-4076(94)01616-8)

Trabandt, M., & Uhlig, H. (2011). The Laffer curve revisited. *Journal of Monetary Economics*, 58(4), 305–327. <https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2011.07.003>

Trandafir, A., & Brezeanu, P. (2011). Optimality of fiscal policy in Romania in terms of Laffer curve. *Theoretical and Applied Economics*, XVIII(8(561)), 53–60.

Turnovsky, S. J. (1999). Fiscal policy and growth in a small open economy with elastic labour supply. *The Canadian Journal of Economics / Revue Canadienne d'Economique*, 32(5), 1191–1214. <https://doi.org/10.2307/136477>

Wanniski, J. (1978). Taxes, revenues, and the Laffer curve. In *The Way the World Works: How Economies Fail, and Succeed* (pp. 3–16). Basic Books in the spring.

Wijayanto, B. (2019). Teori pertumbuhan endogenous (endogenous growth theory). *SSRN Electronic Journal*, 3317961. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3317961>

Wikipedia, the free encyclopedia. (n.d.-a). *AK model*. Retrieved May 31, 2023, from https://en.wikipedia.org/wiki/AK_model

Wikipedia, the free encyclopedia. (n.d.-b). *Endogenous growth theory*. Retrieved May 31, 2023, from https://en.wikipedia.org/wiki/Endogenous_growth_theory

Wikipedia, the free encyclopedia. (n.d.-c). *Pendapatan nasional*.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_nasional

Yossinomita. (2022). Tax policy in limiting the consumption of luxury goods. *Review of Economics and Finance*, 20(1), 165–171. <https://doi.org/10.55365/1923.x2022.20.19>

Yossinomita. (2024). *Hubungan penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui pendekatan endogenous growth model*. Universitas Jambi.

Yossinomita, Haryadi, & Hodijah, S. (2024). Determining the future direction and amount of tax revenue in Indonesia

using an error correction model (ECM). *Ekonomika*, In publishing prosess.

Yossinomita, Haryadi, Nainggolan, S., & Zulfanetti. (2024). The ideal tax ratio for Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, In publishing prosess.

Yossinomita, Haryadi, Nainggolan, S., & Zulfanetti. (2025). Examining the relationship between tax revenue and economic growth in Indonesia through the endogenous growth model. *Finance: Theory and Practice*, 29(4), In publishing prosess.

RIWAYAT HIDUP



Yossinomita lahir di Jambi pada tanggal 21 Agustus 1981 anak dari pasangan Baharuddin dan Sri Salmiah. Penulis adalah anak bungsu dari delapan bersaudara. Menyelesaikan Pendidikan SD hingga SMA di Jambi. Penulis menyelesaikan pendidikan tinggi Program Sarjana, Program Master, dan Program Doktor di Universitas Jambi, Indonesia. Sejak tahun 2020 penulis diangkat menjadi Dosen dan Peneliti pada Prodi Ilmu Manajemen, Fakultas Ilmu Manajemen dan Bisnis, Universitas Dinamika Bangsa. Penulis pernah bekerja sebagai Staf Management by Olympic System (MBOS) di PT. Lontar Papyrus Pulp and Paper (2003). Pegawai pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi (2004-2017). Tenaga Pengajar pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Purnawarman Pajak (2017-2021). Penulis aktif melakukan penelitian terutama terkait dengan perpajakan dan perekonomian. Penulis juga aktif menulis baik pada jurnal nasional dan internasional serta buku.

RIWAYAT HIDUP



Haryadi lahir di Sungai Tutung, Jambi pada tanggal 01 April 1965. Pendidikan SD hingga SMA di tamatkan di Sungai Penuh, Jambi dan Sarjana Ekonomi di raihnya dari Universitas Jambi pada tahun 1989. Gelar Master diperolehnya dari University of Waikato, Hamilton, New Zealand(1998), dengan spesialisasi Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal Asing. Gelar Doktor diraihnya dari Institut Pertanian Bogor Pada tahun 2008, sedangkan Gelar Guru Besarnya (Profesor) diperolehnya pada tahun 2016. Telah menerbitkan beberapa buku antara lain Ekonomi Internasional 1 dan 2 (2007), *Corporate Performance Management* (2011), *The Economics of Education* pada (2014) bersama Prof Veithzal Rivai Zainal dkk. Buku Lengkap Ekonomi Internasional (2014), serta sebagai Editor Buku Manajemen Sumber Daya Manusia (Bersama Dr. Husnul Fikri, 2022); Pembangunan dan Ketimpangan: Isu Publik, Agenda Riset dan Kebijakan (2023). Selain mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, penulis juga dosen pada berbagai Program Magister dan Doktor pada Pascasarjana Universitas Jambi. Pernah

menjadi konsultan pada sebuah perusahaan Swedia (2000) serta PT Puri Consulting di Jakarta (2000-2003). Salah satu tim Asistensi Gubernur Jambi (2000), Kepala Promosi pada Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BAPEMPRODA) Provinsi Jambi (2000-2003), Ketua Kosentrasi Keuangan dan Perdagangan Internasional FE-UNJA. Direktur Eksekutif Center of Development for Regional Studies (CD-FORES) (2000-2003), Pembantu Dekan bidang Kemahasiswaan pada Fakultas Ekonomi Universitas Jambi (2010-2014). Tim Ahli Gubernur Jambi 2018 - 2020, Menjadi Ketua pada berbagai penyusunan program pembangunan daerah di beberapa Kabupaten dan Provinsi. Aktif pada berbagai organisasi kemasyarakatan. Pernah menjadi Sekretaris ICMI Orwil Jambi (2016-2023). Saat ini penulis merupakan sekretaris Dewan Pakar ICMI Orwil Jambi dan Dewan Pakar ISEI Jambi, Anggota Penasehat Lembaga Adat Melayu Jambi, dan Duduk di berbagai Lembaga/organisasi lainnya. Sejak Januari 2021, beliau dipercaya untuk menduduki Jabatan sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Jambi.

RIWAYAT HIDUP



Saidin Nainggolan lahir di Pangururan, Sumatera Utara pada tanggal 16 Agustus 1960. Menyelesaikan pendidikan SD hingga SMA di Sumatera Utara. Penulis menyelesaikan pendidikan tinggi Program Sarjana, Program Master, dan Program Doktor di Universitas Jambi, Indonesia. Sejak tahun 1986 penulis diangkat menjadi dosen dan peneliti di Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Selain mengajar di Fakultas Pertanian Universitas Jambi, penulis juga dosen pada Program Magister dan Doktor pada Pascasarjana Universitas Jambi. Penulis aktif melakukan penelitian pada bidang ekonomi pertanian. Penulis juga aktif menulis baik pada jurnal nasional dan internasional serta buku.

RIWAYAT HIDUP



Zulfanetti lahir di Kamang Hilir, Bukit Tinggi pada tanggal 12 Juli 1963. Menyelesaikan pendidikan SD hingga SMA di Bukit Tinggi. Penulis menyelesaikan pendidikan tinggi Program Sarjana di Universitas Andalas, Program Master dan Program Doktor di Universitas Padjadjaran, Indonesia. Sejak tahun 1988 penulis diangkat menjadi dosen dan peneliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Selain mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, penulis juga dosen pada Program Magister dan Doktor pada Pascasarjana Universitas Jambi. Penulis aktif melakukan penelitian pada bidang ekonomi sumber daya manusia, ekonomi kerakyatan, ekonomi pembangunan, dan UMKM. Penulis juga aktif menulis baik pada jurnal nasional dan internasional serta buku.

Pertumbuhan EKONOMI dan PERPAJAKAN

Tujuan utama penulisan buku ini adalah untuk menganalisis hubungan dua variabel ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi dan perpajakan. Buku ini menyelidiki hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan perpajakan di Indonesia, menggali dampak perpajakan terhadap perkembangan ekonomi negara. Dengan analisis mendalam, penulis membahas peran perpajakan dalam membentuk kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang optimal. Selain itu, buku ini juga mengeksplorasi strategi perpajakan yang dapat diterapkan untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi. Dengan pendekatan interdisipliner, buku ini menjadi panduan penting bagi para pembaca yang tertarik memahami dinamika kompleks antara pertumbuhan ekonomi dan sistem perpajakan di Indonesia.



Penerbit Haura Utama

- Anggota IKAPI Jawa Barat
- Instagram: @haura_utama
- Website: penerbitaura.com
- Email: haura_utama@gmail.com

ISBN 978-623-492-780-1



9 78623 927801